



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

AKSELERASI PENURUNAN STUNTING: APA YANG SUDAH BAIK DAN APA YANG HARUS DIPERKUAT?

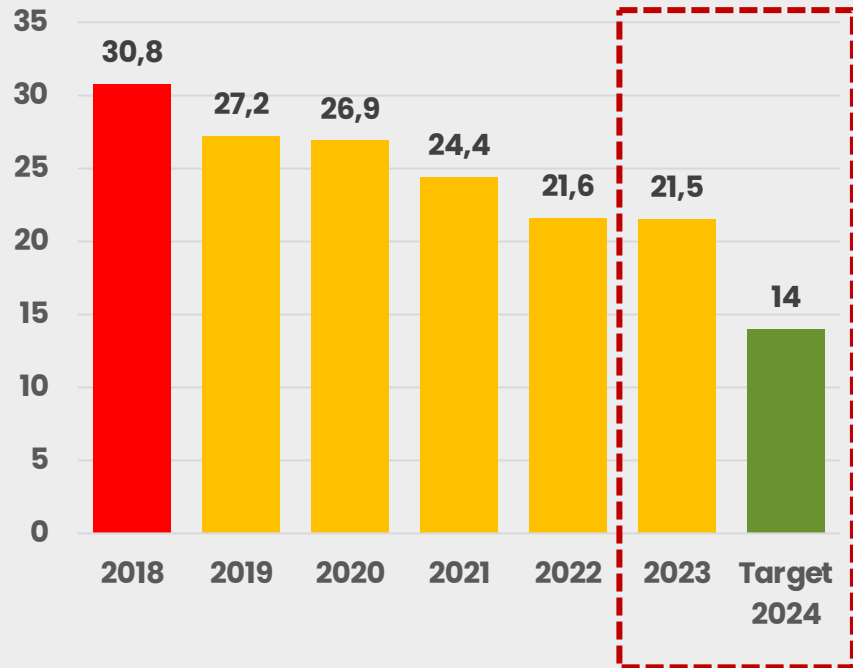
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

**DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN, SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN, selaku
Wakil Ketua Pelaksana Bidang Advokasi dan Kepemimpinan TPPS**

Rakornas Bangsa Kencana dan Stunting 2024

Jakarta, 25 April 2024

CAPAIAN: AKANKAH TARGET 2024 TERCAPAI?

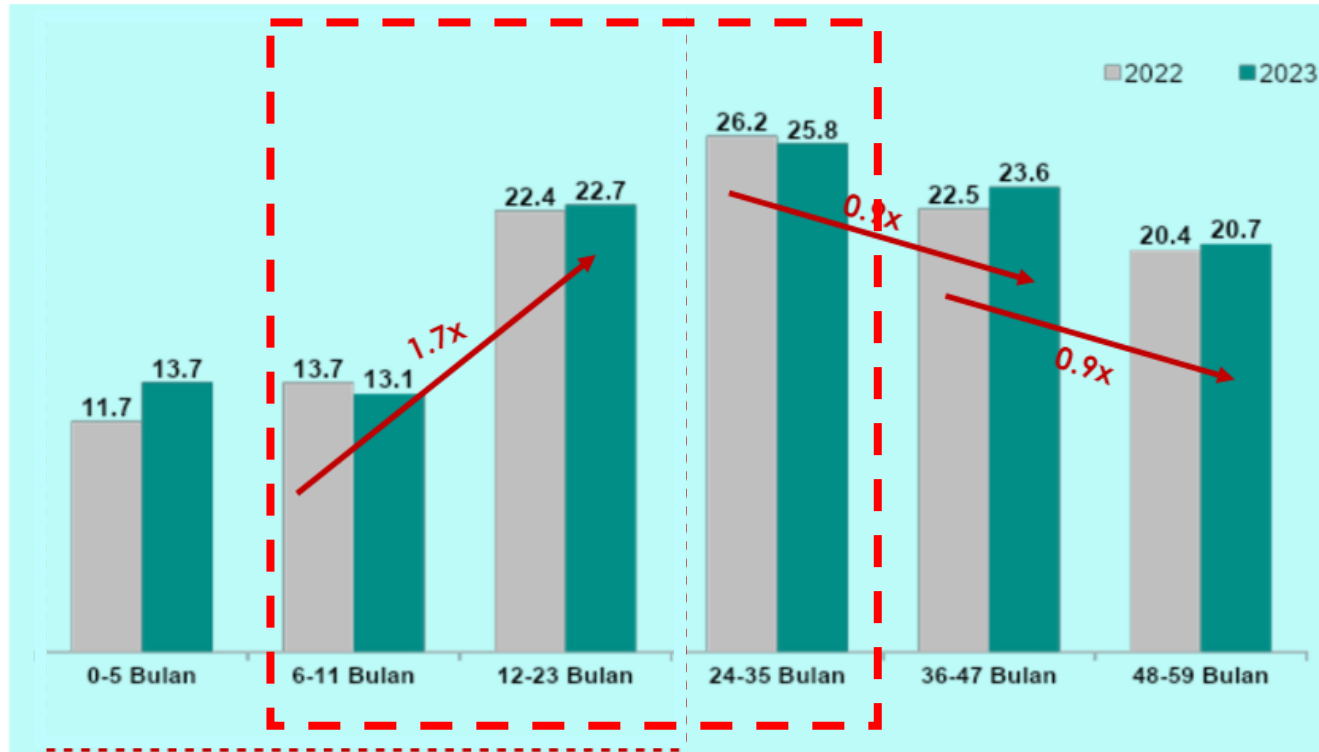


**Untuk dapat mencapai target 14%,
prevalensi stunting harus turun
sebesar 7,5% dalam 1 tahun**

Sumber Data: Riskesdas 2018, SSGBI tahun 2019, Pemodelan 2020, SSGI tahun 2021, SSGI tahun 2022, SKI 2023

- **Terjadi pelambatan penurunan prevalensi stunting dalam 2 tahun terakhir.** Prevalensi tahun 2023 adalah sebesar 21,5% atau hanya turun sebesar 0.1% poin dari tahun 2022 (SKI, 2023).
- Dengan mempertimbangkan kondisi di atas dan waktu yang tersedia untuk implementasi program, nampaknya **target menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 akan sulit dicapai.**
 - **Analisis Pakar: “Tanpa penambahan balita stunting baru di 2024, prevalensi stunting hanya dapat diturunkan hingga 17.3%. Target prevalensi 14% di 2024 tidak mungkin tercapai”** (Dr. Iwan Aryawan).
- Harus **dilakukan analisis** mengapa terjadi **pelambatan penurunan prevalensi stunting pada 2 tahun terakhir?**
 - **Pakar: “pasca terbitnya Perpres 72/2021, program lebih fokus pada anak stunting, seharusnya pada pencegahan”.**
 - Apakah ada **pengaruh dari pandemi Covid 19?**

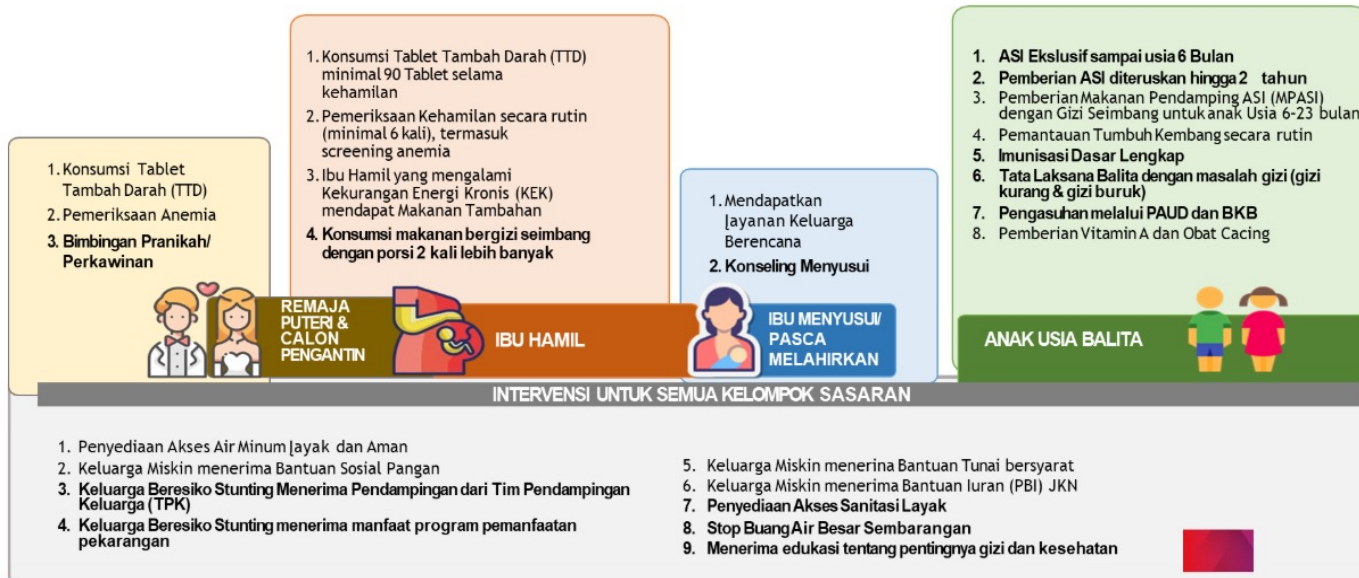
TITIK KRITIS KENAIKAN PREVALENSI ANAK STUNTING



Titik kritis kenaikan prevalensi stunting:
NAIK HAMPIR 2 KALI LIPAT

- Berdasarkan data SSGI 2022 dan SKI 2023, **prevalensi stunting mengalami kenaikan pada usia 6 bulan ke 12 bulan & 24 bulan.** Ini menunjukkan bahwa anak usia tsb **tidak mendapatkan asupan gizi yang mencukupi.**
- Ke depan, intervensi pada kelompok anak usia 6 – 24 bulan harus dikuatkan untuk mencegah terjadinya stunting, seperti:**
 - pemberian **Makanan Pendamping ASI** yang bergizi seimbang dan tepat → berdasarkan SUSENAS 2023, **baru 59,33%**
 - Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)** → berdasarkan SUSENAS 2023 **baru 63,58% Baduta** menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL);
 - perbaikan praktek pengasuhan;**
 - pencegahan kecacingan;** dan lainnya

KERANGKA PROGRAM VERSUS IMPLEMENTASI



Program intervensi dan Data yang masih perlu diperbaiki:

- **Intervensi sudah sangat lengkap/komprehensif** untuk setiap kelompok usia, bukan hanya menyasar pada 1000 HPK, **tetapi kemudian menjadi tidak fokus → diperlukan prioritas sasaran dan intervensi, yaitu pada 1000 Hari Pertama Kehidupan** (Ibu hamil, Ibu Menyusui dan Baduta).
- **Kelurga Berisiko Stunting (KRS) adalah data yang baik, namun masih perlu dipertajam dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program**, tetapi belum semua KL menggunakan data KRS, untuk menjadi **Satu Data Stunting**

Kerangka Implementasi yang harus diperbaiki:

- Perlu ada **pemahaman dan persepsi yang sama terkait dengan kerangka program di tingkat lapangan**
- Berdasarkan beberapa kunjungan lapangan yang dilakukan, **pemahaman kader untuk membaca grafik pertumbuhan pada Buku KIA masih kurang baik**, sehingga ketika berat badan anak tidak mengalami kenaikan, tidak ada intervensi yang dilakukan.
- Ke depan, **perlu peningkatan kapasitas para pelaku di lapangan terkait PPS**.
- **Koordinasi antar pelaku di lapangan harus terus ditingkatkan**.
- **Timing pelaksanaan, sinkronisasi antar program dan ketercukupan program** harus menjadi perhatian

PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF

- TTD Ibu Hamil → **perlu ada skema untuk memastikan TTD dikonsumsi oleh Ibu Hamil**
- **Pemeriksaan kehamilan (K6) perlu ditingkatkan cakupan dan kualitasnya** → tahun 2022 baru 74,3%
- **Cakupan Bumil KEK yang dapat PMT harus ditingkatkan** → baru mencapai 26,8%. (SSGI, 2022)
- **Intervensi untuk Rematri baru fokus untuk yang ada di sekolah** → **perlu ada program untuk menjangkau rematri yang berada di luar sekolah, termasuk pada mahasiswa.**
- **Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap cenderung menurun**, perlu ada upaya meningkatkan cakupan imunisasi melalui perbaikan dari sisi supply maupun sisi demand (penyadaran masyarakat).
- Balita ditimbang dan dipantau tumbuh kembang secara berkala baru mencapai 55% → **peningkatan cakupan anak yang dipantau tumbuh kembang.**
- Kegiatan yang dibiayai oleh DAK selalu mengalami keterlambatan pelaksanaannya di lapangan → **perlu dipastikan DAK bisa dilakukan sejak awal tahun.**
- Antropometri kit sudah disampaikan kepada Posyandu dan USG kepada Puskesmas, tetapi pelatihan penggunaannya belum dilakukan → **perlu peningkatan kapasitas Kader Posyandu dan Petugas Puskesmas**

- Cakupan **ASI Eksklusif** berdasarkan baru 52% → **perlu peningkatan konseling menyusui dan penegakan terkait pemasaran susu formula.**
- **Cakupan dan kualitas MPASI berbasis pangan lokal BARU 59,3% → perlu ditingkatkan dan ditertibkan** → **perlu ada edukasi dan pengawasan dari petugas.**
- **Tata laksana penanganan anak dengan gizi kurang dan gizi buruk harus terus ditingkatkan.**
- Saat ini program untuk mengatasi kecacingan belum ada dalam Perpres 72/2021, padahal mempunyai pengaruh terhadap kemampuan menyerap asupan gizi → **perlu ada program untuk mencegah kecacingan sebagai intervensi prioritas.**
- Kemajuan peningkatan cakupan untuk akses sanitasi dan air minum layak, berdasarkan Data kenaikannya kurang dari 1% setiap tahunnya → **perlu inovasi dan terobosan dari KL untuk mempercepat peningkatan cakupan akses sanitasi dan air minum layak.**
- **Perlu ada perhatian untuk anak-anak yang memerlukan perlakuan khusus**, seperti anak-anak dengan TB, HIV AIDS dan kanker.

MENINGKATKAN KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN: CAPAIAN DAN BEBERAPA CATATAN



- Presiden dan Wakil Presiden mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan PPS.
- Semua Kepala Daerah sudah menandatangani komitmen bersama dalam PPS. Ini penting tapi tidak cukup (necessary but insufficient). **Komitmen perlu dituangkan ke dalam RPJMD dan diwujudkan menjadi program di lapangan sesuai kewenangannya → penguatan pendampingan Kemendagri dengan fokus pada KDH**
- **Komitmen yang tinggi belum disertai dengan pemahaman yang baik tentang stunting.** Akibatnya melahirkan pemahaman dan program yang salah di lapangan.
- **Advokasi baru dilakukan kepada Kepala Daerah**, belum menyentuh kepada anggota legislatif (DPRD) → **perlu ada advokasi kepada DPRD**
- Terkait dengan keterlibatan lembaga non pemerintah, **tidak jelas siapa yang mengkoordinasikan**, karena skim TPPS memberikan kewenangan kepada Ketua Pelaksana dan Seluruh Wakil Ketua untuk mengkoordinasikan, sehingga menimbulkan kebingungan → **perlu kejelasan mekanisme keterlibatan lembaga non pemerintah.**

ARAHAN WAPRES PADA RAPAT PENGARAH DAN PELAKSANA TPPS, 19 MARET 2024



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

1. Data penghitungan penurunan stunting dikaji lagi yang dihasilkan SKI 2023, melalui **perluasan penghitungan hasil survey e-PPGBM** yang lebih akurat
2. Koordinasi perlu dilakukan khususnya untuk program **pemberian makanan tambahan** (PMT)
3. Perpres 72/2021 terus berjalan hingga tahun 2024 untuk selanjutnya kelembagaan di daerah **dipimpin langsung oleh Kepala Daerah**
4. **Intervensi diprioritaskan pada 3 karakter daerah** (1) 5 provinsi dengan jumlah balita stunting tertinggi (Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, Banten); (2) 7 provinsi dg angka prevalensi tinggi; dan (3) daerah dengan kapasitas fiskal rendah
5. **Insentif fiskal** perlu dieksplisitkan untuk daerah-daerah berprestasi perlu diberikan secara kuartalan atau semesteran, legal basisnya juga diperkuat
6. **Optimalkan musyawarah desa (musdes)** untuk pemantapan PPS di tingkat desa dan bagaimana alokasi **dana desa diprioritaskan** untuk stunting
7. **Legal basis anggaran penurunan stunting** dapat ditetapkan melalui Inpres
8. Perlu perubahan strategi, menggunakan **pendekatan targeting**, tidak lagi berbasis intervensi spesifik dan sensitif

BEBERAPA CATATAN HASIL REVIEW PERPRES 72/2021

- Perlu ada **penajaman dalam perencanaan dan penganggaran** di pusat dan daerah.
- Perlu ada upaya untuk **menyamakan pemahaman dan persepsi** di tingkat pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan terkait PPS → pemantapan Strategi Komunikasi
- Target antara yang harus dicapai terlalu banyak, perlu ada **penyederhanaan**.
- Kelembagaan: perlu ada upaya untuk meningkatkan **efektifitas kelembagaan TPPS** di pusat dan daerah.
- Penanggungjawab pelaksanaan **target antara sebagian besar ada di daerah**, sehingga menyulitkan pemantauannya, sehingga perlu ditunjuk **penanggungjawab untuk setiap pilar dan setiap target** yang harus dicapai.
- **Sistem MONEV terintegrasi** harus segera dikembangkan dan disepakati.
- Perlu ada **mekanisme reward dan punishment** bagi daerah dalam pelaksanaan PPS
- Perlu mekanisme bagaimana **inovasi dan riset bisa diakomodir** dalam PPS.
- **Perluasan fokus RAN PASTI** agar tidak hanya pada kegiatan yang menjadi ruang lingkup BKKBN saja, tetapi perlu mencakup penjabaran kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target pada lampiran Perpres



TERIMA KASIH